

**Judul** : Sasaran Pembangunan Jadi Fokus Penyusunan RAPBN  
**Tanggal** : Jumat, 01 September 2023  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 9

## Sasaran Pembangunan Jadi Fokus Penyusunan RAPBN

Tantangan ke depan adalah menyusun struktur belanja RAPBN agar bisa mencapai target sasaran pembangunan, seperti menekan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran.

JAKARTA, KOMPAS— Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2024, tetapi terdapat sejumlah catatan soal sasaran pembangunan ekonomi yang menantang. Struktur belanja dalam desain fiskal tahun depan pun akan dikerucutkan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

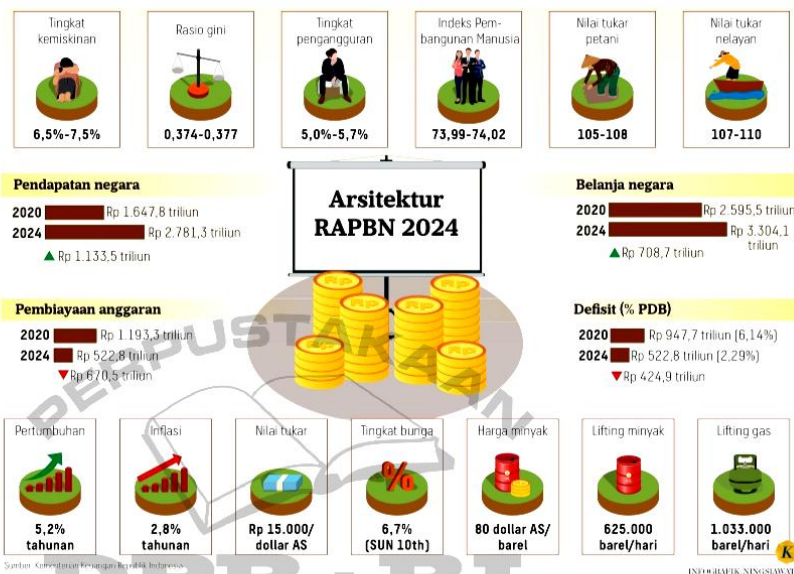
Dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi XI DPR, Kamis (31/8/2023), seluruh fraksi di DPR menyetujui asumsi dasar ekonomi makro sesuai usulan pemerintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2024.

Penetapan asumsi dasar ekonomi makro menjadi langkah awal paling penting dalam proses penyusunan anggaran negara karena berfungsi sebagai landasan menyusun APBN. Penyusunan RAPBN 2024 itu akan dilakukan selama tiga bulan ke depan oleh DPR dan pemerintah sebelum disahkan pada Oktober 2024.

Asumsi dasar ekonomi makro untuk 2024 yang disepakati pemerintah dengan Komisi XI DPR itu adalah pertumbuhan ekonomi 5,2 persen secara tahunan, tingkat inflasi tahunan 2,8 persen, nilai tukar rupiah Rp 15.000 per dolar AS, dan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 persen.

Sementara, asumsi dasar terkait harga minyak mentah Indonesia, *lifting* minyak, dan *lifting* gas pada RAPBN 2024 akan disepakati terpisah dalam rapat kerja pemerintah dengan Komisi VII DPR yang membidangi urusan energi. Dalam Nota Keuangan 2024, pemerintah menargetkan asumsi harga minyak mentah Indonesia 80 dolar AS per barel, *lifting* minyak 625.000 barel per hari, dan *lifting* gas 1,03 juta barel per hari.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, mengatakan, fraksinya tidak keberatan dengan asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan pemerintah. Tantangan ke depan adalah menyusun struktur belanja RAPBN agar benar-benar bisa mencapai target sasaran pembangunan, seperti menekan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, mengeliminasi rasio gini, serta membuka lapangan kerja baru.



Ja membandingkan asumsi makro usulan pemerintah dengan target yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Menurut dia, target-target angka pertumbuhan di RPJMN sudah tidak mungkin dikejar. Oleh karena itu, sudah tepat jika fokus RAPBN tahun depan diarahkan pada kualitas pertumbuhan ekonomi ketimbang mengejar angka pertumbuhan yang tinggi.

"Kita sudah tidak mungkin lagi mengejar target-target angka tinggi di RPJMN. Sekarang yang bisa kita kejar adalah kualitas pertumbuhan, bagaimana membuat arah kebijakan lebih ketat lagi untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan itu," katanya.

### Target kemiskinan

Pemerintah menetapkan target sasaran pembangunan yang cukup tinggi. Hal itu antara lain menurunkan tingkat kemiskinan ke 6,5-7,5 persen, menghapus kemiskinan ekstrem ke 0 persen atau minimal ditekan ke 1 persen, menurunkan rasio gini ke 0,374-0,377, menurunkan kerja-

kat pengangguran terbuka (TPT) ke 5,0-5,7 persen, mematok nilai tukar petani 105-108, nilai tukar nelayan 107-110, dan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02.

Dalam paparan, hampir seluruh fraksi menyoroti target menurunkan angka kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem. Target itu dinilai sulit dicapai tanpa terobosan berupa dukungan kebijakan dan politik anggaran yang kuat.

Menurut anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Andreas Eddy Susetyo, target menghapus kemiskinan ekstrem akan sangat menantang. Tingkat kemiskinan ekstrem per Maret 2023 adalah 1,12 persen. Untuk meniadakan kemiskinan ekstrem, dibutuhkan koordinasi lebih kuat. Sebab, anggaran pengentasan rakyat dari kemiskinan disebar di sejumlah kementerian/lembaga dengan kebijakan yang kerap berjalan sendiri-sendiri secara sektoral.

"Ini akan sangat menantang, melihat kondisi kemiskinan ekstrem kita saat ini. Kami sepakat dengan usulan pemerintah, tetapi dengan catatan, untuk kemiskinan ek-

strem ini kita perlu perhatian secara khusus dan pengendalian anggaran yang sangat ketat," katanya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, meski tingkat kemiskinan nasional sudah berangsur-angsur turun pascapandemi, masih ada sembilan provinsi yang angka kemiskinannya lebih tinggi dari kondisi prapandemi. Ada pula 14 provinsi yang tingkat kemiskinan ekstremnya meningkat meski secara nasional kemiskinan ekstrem telah diturunkan ke 1,12 persen.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widiasanti mengatakan, kondisi sebaran kemiskinan yang masih timpang antarwilayah itu menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperhatikan pemerintah saat menyusun anggaran terkait kemiskinan.

"Dinamika kemiskinan ini harus menjadi perhatian kita karena pertumbuhan ekonomi yang inklusif itu kunci agar kita bisa meratakan tingkat kesejahteraan," kata Amalia.

Pemerintah pun sepakat menjadikan berbagai sasaran pembangunan itu sebagai prioritas dalam penyusunan ang-

garan. Bahkan, untuk pertama kalinya, penghapusan kemiskinan ekstrem akan dimasukkan dalam target sasaran pembangunan di RAPBN 2024. Harapannya, RAPBN bisa lebih fokus disesain untuk mencapai target tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharmo Monoarfa mengakui target sasaran pembangunan dalam RAPBN memang menantang. Pemerintah pun akan melakukan berbagai intervensi kebijakan. Salah satunya, melalui dana desa dalam bentuk bantuan langsung tunai sebagai instrumen untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

"Memang menurunkan angka kemiskinan 2 persen dalam setahun dari posisi sekarang itu sesuatu yang luar biasa yang harus kita lakukan. Tetapi, perlu kita syukuri kalau sekarang ini tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan terus menurun," katanya.

Wakil Menteri Keuangan Suhasili Nazara menegaskan, pemerintah siap menindaklanjuti penyusunan APBN sesuai asumsi makro dan target sasaran pembangunan yang disepakati. (AGE)